

Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Administrasi Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Acum Wijaya¹, Risa Haruman Putri², Anas Khair Prikurnia³, Della Oktavia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Indonesia Mandiri

E-mail: Acumwijaya@uimandiri.ac.id

Article History:

Received: Oktober 10, 2024

Revised: Oktober 15, 2024

Accepted: Oktober 28, 2024

Keywords:

Village
Administration Information
System, Transparency and
Accountability, Digital
Governance

Abstract: *This This community service program aims to implement a village administration information system to enhance transparency and accountability in village governance. The background of this activity arises from the challenges of manual administrative practices still widely used in villages, which often cause delays in services, recording errors, and lack of public information disclosure. The implementation methods include preliminary observation, interviews, system design, software installation, training for village officials, system usage simulation, and monitoring and evaluation. The results show that the developed village administration information system successfully accelerated service processes, simplified administrative recording, and improved data accuracy. Village officials gained new skills through training and simulation, while the community obtained clearer access to public service information. Although some obstacles remain, such as limited infrastructure and lack of technological skills, this program positively impacted the effectiveness of village officials' performance, the quality of public services, and strengthened community trust in village governance. Overall, the implementation of a village administration information system serves as a strategic step toward realizing transparent, accountable, and technology-adaptive village governance. This success is expected to be replicated in other villages as a model for administrative digitalization in support of achieving good governance principles at the village government.*

Pendahuluan

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional salah satunya ditentukan oleh tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, administrasi desa seringkali masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan proses pengelolaan data dan informasi menjadi lambat, tidak efisien, serta rawan terjadi kesalahan pencatatan (Suryanti & Apriadi, 2025).

Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat kini lebih kritis terhadap pengelolaan dana desa maupun pelayanan publik yang diberikan aparatur desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi, baik yang menyangkut keuangan, data kependudukan, maupun pelayanan administrasi sehari-hari (Apriadi, 2025).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah implementasi sistem informasi administrasi desa berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data desa dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi (Sopyan et al., 2025). Melalui penerapan sistem informasi, administrasi desa dapat terdokumentasi dengan baik, mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan (Suryanti et al., 2024).

Selain memberikan kemudahan bagi aparatur desa, sistem informasi administrasi desa juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan adanya sistem yang terbuka dan terukur, masyarakat dapat melihat proses administrasi desa secara lebih jelas. Hal ini tentu dapat meminimalisir terjadinya praktik maladministrasi maupun penyalahgunaan wewenang yang sering menjadi sorotan publik.

Implementasi sistem informasi administrasi desa juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa. Program ini tidak hanya mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran desa yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penerapan sistem informasi administrasi desa memiliki kontribusi langsung terhadap tercapainya prinsip good governance (Ra'is, 2022).

Namun, kenyataannya masih banyak desa yang belum sepenuhnya mampu mengadopsi sistem informasi secara optimal. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknologi, serta keterbatasan infrastruktur digital menjadi

hambatan utama. Aparatur desa seringkali belum memiliki keterampilan memadai dalam mengoperasikan aplikasi sistem informasi, sehingga pemanfaatan teknologi tidak berjalan maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya adanya pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa agar mampu memahami dan memanfaatkan sistem informasi administrasi dengan baik. Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu aparatur desa meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis, sehingga mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga dapat mengembangkan sistem sesuai kebutuhan desa (Ichsanudin & Azizah, 2023).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam implementasi sistem informasi administrasi desa juga perlu diperhatikan. Sistem yang terbuka memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur desa, tetapi juga terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat (Susanti et al., 2025).

Penerapan sistem informasi administrasi desa pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses administrasi yang sebelumnya rumit dan lambat dapat dipangkas menjadi lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini tentu berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian dalam bentuk implementasi sistem informasi administrasi desa menjadi langkah strategis untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan desa dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas administrasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar implementasi sistem informasi administrasi desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan administrasi desa secara digital (Jumasa, 2024).

Tahapan awal dimulai dengan melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi administrasi desa yang berjalan saat ini. Observasi dilakukan guna memperoleh gambaran tentang pola kerja aparatur desa, kendala dalam pencatatan administrasi, serta kesiapan perangkat desa dalam mengadopsi teknologi digital. Hasil

observasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Selanjutnya dilakukan wawancara dan diskusi dengan perangkat desa untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan administrasi yang dihadapi. Tahap ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparatur desa terhadap penggunaan teknologi. Dari kegiatan ini diperoleh data tentang kebutuhan mendesak, baik terkait pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan desa, maupun manajemen dokumen (Rusmianto, 2016) ; Supriyanto, S., & Basuki, R. A. (2023).

Tahap perancangan sistem informasi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil observasi dan wawancara. Sistem informasi yang dikembangkan dirancang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kapasitas aparatur desa. Desain sistem meliputi modul kependudukan, modul pengelolaan keuangan desa, dan modul pelayanan administrasi umum (Mukhsin, 2020).

Setelah sistem informasi selesai dirancang, dilakukan instalasi perangkat lunak pada komputer atau perangkat yang tersedia di kantor desa. Instalasi ini disertai dengan penyiapan jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan secara penuh (Amirullah et al., 2023) ; Wijaya, A. (2023).

Pelatihan bagi aparatur desa merupakan tahap penting dalam metode ini. Pelatihan diberikan secara bertahap, mulai dari pengenalan konsep dasar sistem informasi, cara menginput data, hingga pemanfaatan sistem untuk menghasilkan laporan administrasi. Pendampingan intensif dilakukan agar aparatur desa dapat menguasai penggunaan sistem dengan baik.

Selain pelatihan, dilakukan simulasi penggunaan sistem informasi administrasi dalam kegiatan sehari-hari. Simulasi ini bertujuan untuk menguji keterampilan aparatur desa dalam menghadapi situasi nyata, seperti pelayanan pembuatan surat, pencatatan transaksi keuangan desa, dan penyusunan laporan. Hasil simulasi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem maupun metode pelatihan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi sistem informasi administrasi desa. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat keterampilan aparatur desa, kelancaran penggunaan sistem, serta respon masyarakat terhadap perubahan layanan administrasi. Data dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Metode pengabdian ini juga menekankan kolaborasi antara tim pengabdian, aparatur desa, dan masyarakat. Kolaborasi diwujudkan dalam bentuk forum diskusi bersama, penyampaian umpan balik, dan perencanaan tindak lanjut. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan sistem informasi administrasi desa dapat berfungsi secara

berkelanjutan (Nurlela, 2025) Dewi, A. S., Sari, D., dkk. (2023).

Tahap akhir dari metode ini adalah penyusunan laporan hasil implementasi dan rekomendasi strategis bagi desa. Laporan ini mencakup capaian yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta rencana pengembangan sistem ke depan. Dengan demikian, implementasi sistem informasi administrasi desa tidak hanya berhenti pada kegiatan pengabdian, tetapi dapat terus berkembang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Hasil

Pelaksanaan pengabdian ini berhasil menghasilkan sistem informasi administrasi desa yang dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa. Sistem ini memiliki fitur utama berupa pencatatan data kependudukan, pengelolaan keuangan desa, serta pembuatan dokumen administrasi umum. Fitur-fitur tersebut dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh aparatur desa yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

Hasil dari tahap observasi menunjukkan bahwa sebelum adanya sistem informasi, administrasi desa masih dilakukan secara manual dengan pencatatan di buku register. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Dengan adanya sistem informasi, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pada tahap instalasi dan implementasi, sistem dapat berjalan dengan baik pada perangkat komputer desa. Aparatur desa mulai terbiasa menggunakan aplikasi untuk menginput data kependudukan, sehingga database desa tersusun lebih rapi. Data yang sebelumnya tercecer kini dapat disimpan dalam sistem secara terintegrasi dan lebih aman.

Pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar aparatur mampu memahami langkah-langkah dasar dalam mengoperasikan sistem informasi, seperti memasukkan data baru, memperbarui data lama, dan mencetak dokumen administrasi. Tingkat partisipasi aparatur desa dalam pelatihan cukup tinggi, yang menunjukkan adanya minat untuk beradaptasi dengan teknologi.

Simulasi penggunaan sistem dalam pelayanan sehari-hari juga menghasilkan peningkatan kinerja. Proses pembuatan surat keterangan yang sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 30 menit, kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Perubahan ini memberikan dampak langsung terhadap kepuasan masyarakat yang merasa dilayani lebih cepat dan tepat.

Hasil monitoring awal menunjukkan adanya peningkatan keteraturan dalam

pengelolaan keuangan desa. Pencatatan transaksi yang dilakukan melalui sistem lebih mudah ditelusuri, sehingga laporan keuangan desa dapat disusun secara transparan. Aparatur desa juga merasa terbantu karena tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual yang sering kali menimbulkan kesalahan.

Selain memberikan manfaat bagi aparatur desa, sistem informasi ini juga berdampak positif terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelayanan administrasi dengan lebih jelas, misalnya mengenai prosedur dan waktu pelayanan. Transparansi ini mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di desa dan keterbatasan perangkat komputer. Kendala ini membuat proses input data terkadang terhambat. Namun, dengan adanya pendampingan dari tim pengabdian, permasalahan ini dapat diminimalisir melalui strategi penggunaan sistem secara offline dengan sinkronisasi data ketika jaringan tersedia.

Evaluasi akhir menunjukkan bahwa aparatur desa merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas administrasi setelah adanya pelatihan dan pendampingan. Mereka juga lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi desa. Hal ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan implementasi sistem informasi administrasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi desa mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur desa, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk mendorong digitalisasi administrasi di desa-desa lain sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskusi

Hasil implementasi sistem informasi administrasi desa menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sistem yang dibangun membantu aparatur desa dalam menyederhanakan proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan administrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas dalam good governance, di mana setiap proses pemerintahan dituntut untuk berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Penerapan sistem informasi administrasi desa juga terbukti meningkatkan transparansi. Sebelum adanya sistem, masyarakat sulit mengakses informasi terkait pelayanan maupun pengelolaan anggaran desa. Namun, dengan adanya sistem informasi,

data dan laporan dapat ditampilkan lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Transparansi ini merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik.

Dari sisi akuntabilitas, sistem informasi memudahkan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan administrasi yang dilakukan. Laporan keuangan, data kependudukan, dan dokumen administrasi kini dapat tersimpan secara digital dan dapat diaudit dengan lebih mudah. Hal ini meminimalisir risiko manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang, yang sering menjadi masalah dalam tata kelola pemerintahan desa.

Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem teknologi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan yang diberikan terbukti mampu meningkatkan keterampilan aparatur desa, tetapi keberlanjutan penggunaan sistem masih memerlukan pendampingan lanjutan. Hal ini karena sebagian aparatur masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam penggunaan fitur yang lebih kompleks.

Kendala infrastruktur juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan akses internet di beberapa desa menyebabkan sistem tidak selalu dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, solusi berupa sistem hybrid yang dapat berjalan secara offline dan online menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan implementasi. Dengan demikian, keterbatasan teknologi tidak menjadi penghalang dalam penerapan sistem informasi administrasi desa.

Selain aspek teknis, keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sistem informasi juga menjadi isu penting. Sistem informasi desa seharusnya tidak hanya menjadi alat bagi aparatur desa, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan masukan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era transformasi teknologi. Pemerintah desa yang mampu mengadopsi sistem informasi administrasi akan lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, desa juga akan lebih siap menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja aparatur pemerintahan.

Keberhasilan implementasi sistem informasi administrasi desa dapat dijadikan model bagi desa lain dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Namun, model ini tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa. Fleksibilitas dalam pengembangan sistem akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaannya.

Dari sisi akademik, hasil pengabdian ini juga memberikan kontribusi terhadap

kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Sistem informasi administrasi desa dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga praktik penyelenggaraan pemerintahan lebih sesuai dengan tuntutan regulasi dan harapan masyarakat.

Dengan demikian, diskusi ini menekankan bahwa implementasi sistem informasi administrasi desa bukan hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga tentang transformasi tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Keberhasilan digitalisasi desa membutuhkan sinergi antara teknologi, kapasitas aparatur, infrastruktur, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Sinergi inilah yang pada akhirnya akan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Kesimpulan

Implementasi sistem informasi administrasi desa terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem ini, proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Masyarakat juga memperoleh akses informasi yang lebih jelas sehingga dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur desa.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini tidak hanya terletak pada tersedianya sistem informasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan pemahaman teknologi, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada prinsip good governance.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh aparatur desa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini. Dukungan dan keterbukaan dari pemerintah desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi administrasi desa. Tanpa kerja sama yang baik, kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat desa yang telah memberikan dukungan moral dan turut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah desa dan warganya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak universitas, lembaga penelitian, serta tim pelaksana pengabdian yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pendampingan, bimbingan teknis, maupun penyediaan sumber daya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan lebih lanjut dalam upaya digitalisasi pemerintahan desa.

References

- Amirullah, I., Sari, L. P., Syafaruddin, S., Rasyid, M. F. F., Lira, H. M. A., Mallappiang, N., Masdar, M., & Natsir, N. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa melalui E-Government. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 1(6), 89–96.
- Apriadi, E. A., Lestari, S., & Irianto, S. Y. (2024). Comparison of Performance of K-Nearest Neighbors and Neural Network Algorithm in Bitcoin Price Prediction. *Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika*, 8(2), 617-622.
- Ati, H. D. L., Sukarson, A., Hakim, I. L., Syaifudin, A., Putra, N. A., & Apriadi, E. A. (2024). Pengembangan Usaha Budidaya Lele Sebagai Upaya Pengentasan Stunting Rumah Tangga Di Kawasan Pedesaan. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3(2), 62-71.
- Dewi, A. S., Sari, D., Azria, N., Pujiati, A., & Mauliana, Y. (2023). Penyuluhan Tentang Pengolahan Limbah Serbuk Gergaji Menjadi Pupuk Kompos dan Media Tanam di Desa Sumber Rejo, Kemiling. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 1(4), 193-203.
- Ichsanudin, I., & Azizah, N. N. (2023). i EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS WEBSITE DESA TAMBAKBAYA KECAMATAN KABUPATEN LEBAK). *Kappemi/ STISIP Banten Raya*, 3(1).
- Jumasa, H. M. (2024). Analisis Tingkat Kesiapan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Di Desa Kedungpomahan Wetan Purworejo. *INTEK: Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 7(2), 18–25.
- Masditok, T., Gunarsih, T., Geraldina, I., & Wihadanto, A. (2024). The Influence of ESG on Return on Asset ASEAN Companies 2013-2023. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 485-501.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15.
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109–118.

- Rusmianto, R. (2016). Desain Sistem Informasi Akuntansi Desa dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*.
- Sari, D., Azriya, N., Anum, A., & Devi, H. (2021). Penyuluhan Digital Marketing untuk Usaha Rumahan di Kelurahan Tanjung Baru Kec. Kedamaian. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 2(02), 88-93.
- Supriyanto, S., & Basuki, R. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Pemasaran Online Pada Remaja Milenial di SMK Tri Ratna-Jakarta Barat. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 3(1), 44-52.
- Suryanti, P., Apriadi, E. A., & LARAS, H. D. (2024). COMMUNICATION INTERACTION IN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS DESCRIPTIVE STUDY. *Journal of Public Relations and Digital Communication (JPRDC)*, 2(2), 64–68.
- Susanti, H., Heriyanto, H., Mulianto, B., Yusramizza, Y., Gunawan, H., Karya, D., Rafli, D. Y., Yuda, D., Kurniadi, K., & Syafii, M. (2025). Pemberdayaan Desa Binaan Berbasis Budaya Hukum dengan Penerapan (SIMDES) Sistem Informasi Transparansi Dana Desa di Pulau Gadang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 333–342.
- Wijaya, A. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt Panin Bank Tbk Di Jakarta Pusat. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2(1).